

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN
TUJUAN ANGGARAN, DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP
KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) Kota Banda Aceh)**

Jalaluddin

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Dafi Bahri

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

The purpose of this research is to be able to test and analyze the effects of budget participation, clarity of budget goals, and evaluation of budget performance regional government officials in Banda Aceh city. Population in this research is that local government officials which amounted to 35 institutions 1 Secretariat area, 12 offices, 16 Service, Hospital 1, and 5 Agency. While the sample in this study consisted of, Chief Secretary / Department / Agency / Hospital / and the Office, the Head of Planning, and Ka.TU participated in the preparation of the Budget.

The collection of data and information needed in the study conducted by research field (field research). The primary data obtained directly from research subjects in the form of perceptions by responden of the questionnaire circulated in the form of a questionnaire to 93 respondents.

The study found that budget participation, clarity of budget goals, and evaluation of budgets simultaneously either partially or significantly affect the performance of local government officials in Banda Aceh city government. This shows that that in the formulation, implementation, and budget accountability has to follow the established rules of the staff and community participation in both formulating, implementation, and budget accountability has to follow the established rules of the staff and community participation in both formulating, implementing, and budget accountability. Qualitative research paper supports the findings of quantitative analysis.

To strengthen subsequent research needs to be testing again to see the consistency of previous studies. In order for the next studies need to be more representative or the addition of the addition or substitution of variables for supporting the research findings better or more extensive.

Keyword: Budget Participation, Goal Clarity Budget, Budget and Performance Evaluation

1. PENDAHULUAN

Peran penting anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukkan input dan sumber daya yang telah dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan tugas yang dibebankan kepada mereka. Organisasi sektor publik sering berhadapan dengan kurangnya pengukuran output yang sesuai, sehingga pengukuran efektivitas didasarkan pada input yang digunakan. Padahal, pengeluaran yang dialokasikan tersebut menunjukkan berapa jumlah dana maksimum yang dapat dikeluarkan untuk kegiatan ini, melainkan juga alokasi tersebut memberikan indikasi mengenai berapa level dari pemberian jasa.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu Suatu Sistem Anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005). Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjangkaran aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Partisipasi Anggaran

Partisipasi sangat berarti dalam proses anggaran untuk menentukan hasil kinerja aparat pemerintah Partisipasi adalah :

”Proses pengambilan keputusan bersama atau dua pihak atau lebih yang membawa pengaruh dikemudian hari bagi mereka yang ikut dalam memberikan keputusan. Partisipasi menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami

anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka.

(Poerwati (2002)

Pada Bukunya Aimee & Carol (2004) menjelaskan partisipasi anggaran adalah:

“Menemukan mekanisme input partisipasi warga negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan input warga negara kedalam operasional kota bisa membantu dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili konstituen dan memberikan visi, arahan kebijakan jangka panjang”.

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggung jawaban anggaran mereka. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif dan legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan-usulan dari setiap unit kerja yang disampaikan kepada Kepala Bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu DPRD bersama-sama menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Anggaran

Merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran adalah :

”Proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran/penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter.”

(Mardiasmo.2002:61)

Menurut Freeman (1998), memberikan definisi Anggaran adalah :

” Sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)”.

Fungsi Anggaran :

Mardiasmo (2002) menjelaskan fungsi-fungsi anggaran dalam 8 aspek :

- Sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi
- Anggaran sebagai alat Pengendalian (Control Tool).
- Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Digunakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
- Anggaran sebagai alat politik.
- Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
- Anggaran sebagai alat penilaian Kinerja.
- Anggaran sebagai alat motivasi.
- Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik.

Kejelasan Tujuan Anggaran

Deddy Nordiawan dalam Akuntansi Sektor Publik (2006) menjelaskan tujuan anggaran yaitu sebagai alat perencanaan, dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

Kenis (1979) menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.

Evaluasi Anggaran

Munawar (2006) menjelaskan evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.

Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat pelaksanaan mereka tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat kinerja mereka menjadi rendah.

Pengertian Kinerja

Prawirosentono (2002 : 120) menyebutkan kinerja, atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi, dengan kata lain, bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan kinerja organisasi juga baik.

Lowyer dan Porter (dalam As'ad, 2000 : 48), menuliskan bahwa job performance atau kinerja usaha adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan, sebagai suatu tingkatan dimana karyawan memenuhi/mencapai persyaratan kerja yang ditentukan. Menurut Dessler (2000 : 268), analisis kinerja adalah memferifikasi bahwa ada kemerosotan kinerja dan menetapkan apakah kemerosotan ini sebaiknya diperbaiki melalui pelatihan atau melalui sarana lain.

Pengukuran Kinerja

Michael, dan Troy (2000) menjelaskan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan akuntabel oleh pemerintah lokal. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan visi dan tujuan dari rencana strategis mereka dengan menggunakan input dari masyarakat/publik. Jika input dari masyarakat ini tidak diakomodasi maka akan mengundang kritikan, walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakan secara efisien sekalipun.

Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun lebih dari itu. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut.

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja

Aimee & carrol (2004) menemukan mekanisme input partisipasi warga Negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan input warga negara ke dalam operasional kota bias membantu dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili konstituen dan memberikan visi dan arahan kebijakan jangka panjang. Maryanti (2002) menemukan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan kinerja aparat pemerintah daerah provinsi NTT tidak dipengaruhi oleh partisipasi anggaran baik dalam menyiapkan usulan anggaran, pelaksanaan anggaran maupun dalam mempertanggung jawabkan anggaran.

Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja

Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Kennis (1979) menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relative sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegangan tujuan anggaran mereka.

Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja

Evaluasi anggaran menunjukkan pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Maryanti (2002) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah provinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah di programkan, namun pada saat pelaksanaan mereka tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat kinerja mereka menjadi rendah.

Hipotesis

Ha : Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan dan evaluasi anggaran baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas (Kepala Dinas, Kepala Bagian Perencanaan dan Tata Usaha), Badan (Kepala Badan, Kepala Bagian Perencanaan Dan Tata

Usaha) Kantor (Kepala Kantor dan Tata Usaha), Rumah sakit (Kepala Rumah Sakit dan Tata Usaha) di kota Banda Aceh. Jumlah populasi terdiri atas Kepala Dinas 16 responden, Kepala Badan 5 responden, Kepala Kantor sebanyak 12 responden, Kepala Rumah Sakit 1 dan Kepala bagian 21 dan Tata usaha sebanyak 21 responden sehingga total responden yang diteliti sebanyak 241 responden. Dari 241 responden diambil sampel sejumlah 93 responden.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data skunder, yaitu pengumpulan data untuk memperoleh pedoman teoritis dari beberapa literatur berupa buku-buku teks, dan jurnal-jurnal yang relevan serta ada hubungannya dengan masalah pada penelitian ini.
- b. Data primer, yaitu yang diperoleh dengan menggunakan survey kuisisioner dengan cara mengirimkan angket melalui jasa pos atau antar langsung kepada responden yang dituju. Wawancara singkat dengan pimpinan/kepala bagian yang relevan sebagai responden.

Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data digunakan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif melalui program SPSS. Metode penelitian pada pengujian hipotesis menggunakan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y	=	Kinerja Aparat Pemda
a	=	Konstanta
b ₁ ...b ₄	=	Koefisien regresi
X ₁	=	Partisipasi Anggaran
X ₂	=	Kejelasan Tujuan Anggaran
X ₃	=	Evaluasi Anggaran
e	=	Standar error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas dan Uji reabilitas

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5% yaitu diatas 0.213 (Lihat Tabel Nilai Kritis Korelasi r *Product-Moment* untuk n = 93 pada lampiran output SPSS), sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konstrak.

Hasil Uji Asumsi Klasik.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi apakah variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian dianalisis dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov*.

Uji Multikolinearitas

Dalam penggunaan model analisis regresi linier berganda apabila terjadi pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka dalam penelitian akan diperbaiki dengan menggunakan Uji Multikolinearitas yaitu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel penjelas saling berhubungan secara linier dalam penggunaan regresi linier. Apabila hubungan antara semua atau beberapa variabel penjelas sangat erat berarti terjadi multikolinearitas, akibat variabel penaksir cenderung menjadi terlalu besar sehingga t_{hitung} menjadi terlalu kecil dan tidak signifikan.

Pengujian Reliabilitas Alat Ukur

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya Cronbach's Alpha dengan bantuan program SPSS 15.0. Hasilnya seperti yang terlihat di tabel 4.3 yang menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini reliabel (handal) karena nilai alphanya lebih besar dari 0,50 (Malhotra, 1996 : 305).

Tabel 4.1
Pengujian Reliabilitas

No.	Variabel	Rata-rata	Jumlah Variabel	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	Partisipasi anggaran (x1)	4.063	8	0.769	Handal
2.	Kejelasan tujuan anggaran (x2)	4.265	7	0.824	Handal
3.	Evaluasi anggaran (x3)	4.053	7	0.601	Handal
4.	Kinerja aparat Pemda (Y)	4.228	7	0.819	Handal

Berdasarkan analisis reliabilitas dapat diketahui bahwa alpha untuk masing-masing variabel partisipasi anggaran (x1) diperoleh nilai alpha sebesar 76.9%, variabel Kejelasan tujuan anggaran (x2) diperoleh nilai alpha sebesar 82.4%, variabel evaluasi anggaran (x3) diperoleh nilai alpha sebesar 60.1%, dan untuk variabel kinerja aparat Pemda (Y) pada instansi pemerintahan di Kota Banda Aceh diperoleh nilai alpha sebesar 81.9%. dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran variabel penelitian memenuhi kredibilitas *cronbach alpha* sebagaimana dipersyaratkan oleh Malhotra dimana nilai alphanya lebih besar dari 0.60%.

Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda

Sebagai yang dikemukakan pada perumusan masalah dan hipotesis, penelitian yaitu menganalisis pengaruh partisipasi anggaran (x1), kejelasan tujuan anggaran (x2) dan evaluasi anggaran (x3) sebagai variabel bebas (independen variabel) terhadap kinerja aparat Pemda pada Pemerintahan di Kota Banda Aceh sebagai variabel terikat (dependent variabel) baik secara simultan maupun parsial, maka untuk menjelaskan didasarkan kepada analisis regresi berganda seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Pengaruh Masing-Masing Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

Nama Variabel	B	Standar Error	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
Konstanta (a)	2.341	0.119	19.672	1.987	0.000
Partisipasi anggaran (x1)	0.163	0.020	7.970	1.987	0.000
Kejelasan tujuan anggaran (x2)	0.110	0.025	4.354	1.987	0.000
Evaluasi anggaran (x3)	0.149	0.024	6.130	1.987	0.000

Dari tabel diatas dapat jelaskan analisis diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = 2.341 + 0.163x_1 + 0.110x_2 + 0.149x_3 + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut:

Koefisien Regresi (β):

- Konstanta sebesar 2.341. Artinya jika faktor-faktor partisipasi anggaran (x1), kejelasan tujuan anggaran (x2) dan evaluasi anggaran (x3), dianggap konstan, maka besarnya kinerja aparat Pemda adalah 2.341 pada satuan skala likert atau kinerja aparat Pemda pada Pemerintahan di Kota Banda Aceh masih dikatakan rendah.
- Koefisien regresi partisipasi anggaran (x1) sebesar 0.163. Artinya bahwa setiap 100% perubahan/perbaikan, dalam variabel partisipasi anggaran, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja aparat Pemda sebesar 16.3%, dengan demikian semakin baik partisipasi anggaran yang dilakukan oleh pihak Pemda, maka akan semakin meningkatkan kinerja aparat Pemda pada Pemerintahan di Kota Banda Aceh.
- Koefisien regresi Kejelasan tujuan anggaran (x2) sebesar 0.110. Artinya setiap 100% perubahan/perbaikan, dalam variabel kejelasan tujuan anggaran, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja aparat Pemda sebesar 11.0%, jadi dengan adanya kejelasan tujuan anggaran, maka secara relatif akan dapat meningkatkan kinerja aparat Pemda pada Pemerintahan di Kota Banda Aceh.
- Koefisien regresi evaluasi anggaran (x3) sebesar 0.149. Artinya setiap 100% perubahan/perbaikan, dalam variabel evaluasi anggaran, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja aparat Pemda sebesar 14.9%, jadi dengan adanya evaluasi anggaran akan dapat meningkatkan kinerja aparat Pemda Pada Pemerintahan di Kota Banda Aceh.

Pengujian secara Simultan

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel partisipasi anggaran (x1), kejelasan tujuan anggaran (x2), evaluasi anggaran (x3) terhadap variabel kinerja aparat Pemda pada Pemerintahan di Kota Banda Aceh, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Analisis Of Variance (Anova)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.
Regresi	3.074	3	1.025	62.786	2.711	0.000
Sisa	1.387	85	0.016			
Total	4.461	88				

Hasil pengujian secara simultan diperoleh F_{hitung} sebesar 62.786, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 2.711. Hal ini memperlihatkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan tingkat probabilitas 0.000. Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat diambil suatu keputusan bahwa menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol, artinya bahwa variabel partisipasi anggaran (x1), Kejelasan tujuan anggaran (x2) dan evaluasi anggaran (x3), secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemda pada Pemerintahan di Kota Banda Aceh.

Hasil Uji t

Untuk menguji faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja penyusunan anggaran secara parsial (setiap variabel) dari hasil uji-t

- Hasil penelitian terhadap variabel partisipasi anggaran diperoleh t_{hitung} sebesar 7.970, sedangkan t_{tabel} sebesar 1.987, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0.000 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$.
- Hasil penelitian terhadap variabel Kejelasan tujuan anggaran diperoleh t_{hitung} sebesar 4.354, sedangkan t_{tabel} sebesar 1.987, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$.
- Hasil penelitian terhadap variabel evaluasi anggaran diperoleh t_{hitung} sebesar 6.130 sedangkan t_{tabel} sebesar 1.987, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$.

Pembuktian Hipotesis

Dalam membuktikan hipotesis alternatif bahwa terdapat pengaruh secara langsung antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat Pemda pada Pemerintahan di Kota Banda Aceh melalui indikator partisipasi anggaran, Kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran, hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$.

5. KESIMPULAN

1. Partisipasi Anggaran mempengaruhi kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
2. Kejelasan Tujuan Anggaran mempengaruhi kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
3. Evaluasi Anggaran mempengaruhi kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
4. Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan tersebut terletak pada hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada objek penelitian yang terbatas pada pegawai yang terlibat langsung pada penyusunan anggaran, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian dilakukan pada objek dan daerah penelitian yang berbeda.

Keterbatasan selanjutnya, Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner, kecilnya bahkan ketidaklengkapan data pada tingkat pengembalian kuesioner, sehingga akan menimbulkan masalah jika tanggapan responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Keadaan seperti ini merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan karena berada diluar kemampuan peneliti.

Selanjutnya peneliti adalah pihak yang menilai apakah pejabat yang menjadi responden memiliki kinerja yang baik atau tidak dan seberapa besar signifikan dari indikator yang diteliti tersebut berdasarkan dari jawaban yang diterima dari kuesiner yang disebarkan pada responden.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

- a. Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya.
- b. Mengenai variabel dan responden, agar penelitian berikutnya lebih representatif dalam menentukan dan memilih penambahan bahkan penggantian dari penelitian sebelumnya. Demi menunjang hasil penelitian yang lebih baik dan lebih luas.
- c. Pada penelitian berikutnya mencoba dengan menggunakan statistik non –parametrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimee, F dan Carol, (2004) *Alingning Priorities In Local Budgeting Procees*.
Journal of Publik Budgeting, Accounting & Financial Management.
Boca Raton Summer 2004 Vol. 16. Iss 2; pg 210, 18 pgs.s
- Deddi Nordiawan (2006), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit, Jakarta : Salemba Empat.
- Dessler, Gary (2000) *Management Personalialia. Terjemahan Agus Darma*,
Penerbit, Jakarta : Erlangga.
- Freeman, Robert J., *et al* (1998), *Governmental and Non-Profit Accounting : Theory and Practise*, Third Edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc.

JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI

Vol. 2, No. 1. Januari 2009

Hal. 44-53

- Gujarati, Darmodar, (2001), *Ekonometrika Dasar*, diterjemahkan oleh Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Kenis, I, (1979), Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*. Vol 707-721
- Kurnia, Ratmawati. (2004), Pengaruh Budgetary Goal Chaaracteristic terhadap kinerja Manajerial dengan Budaya Paternalistik dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)VII*
- Lowyer, Porter, (2000), Job Performance, *Journal of Budgeting Accounting & Performance Job*.
- Malhotra, Naresh K (2005), Riset Pemasaran : Pendekatan Terapan, Terjemahan Maryam, Soleh Rusyadi, Jilid 1, Jakarta : PT. Indeks.
- Maryanti, H, A, (2002), *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*.Tesis
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan*, Penerbit, Jakarta : Erlangga.
- Michael, W.S. dan Troy A. (2000), Financial Performance Monitoring And Customer Oriented Government: A Case Study. *Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*, pgs 87-105
- Munawar (2006) Pengaruh karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Pemerintah Daerah Kupang. *Simposium Nasional Akuntansi IX*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40.
- Poerwati, Tjahjaning. (2002) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial, Budaya Organisasi dan Motivasi sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi V*.
- Prawirosentono (2002) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Bumi Aksara,.
- _____ (2005) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____ (2006) Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____ (2007) Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 59 Tahun 2007 pasal 110 tentang *Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD*.
- Saleh. M. (2004). *Pengaruh Karakteristik Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah tingkat II Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Skripsi
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.